



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	10 (<i>sepuluh</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI dengan Perum Bulog, PT RNI (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero)
Hari, Tanggal	:	Senin, 20 April 2020
Pukul	:	11.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Pembahasan mengenai kondisi Aktual terkait dampak Covid-19, dan 2. Lain-lain.
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso; 3. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Eko Taufik Wibowo; 4. Direktur Utama PT Berdikari (Persero), Harry Warganegara; 5. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero), Karyawan Gunarso; 6. Direktur Utama PT Pertani (Persero), Maryono beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI pada pukul 11.22 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 20 April 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara virtual.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero) untuk segera menyusun strategi antisipasi kelangkaan bahan pangan akibat dampak pandemi Covid 19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya daerah rawan terdampak pandemi yang perlu diprioritaskan.
2. Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero) untuk melakukan pemetaan serta membuat simulasi dampak Covid-19 terhadap ketersediaan pangan di Indonesia baik ringan, menengah maupun berat dalam berbagai jangka waktu sehingga dapat dilakukan respon untuk tiap periode atas dampak yang dihadapi.
3. Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero) memastikan kecepatan dan ketepatan distribusi bahan pangan dan barang kebutuhan pokok lainnya dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang berlangsung.
4. Komisi VI DPR RI mendorong Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero) untuk berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menyerap dan menggunakan anggaran tambahan dalam penyediaan sembako dan kebutuhan pokok yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Komisi VI DPR RI meminta BUMN bidang Pangan untuk membuat analisa yang tepat jangka pendek, menengah dan panjang untuk menghitung berapa kebutuhan pangan dalam negeri dengan cara mengoptimalkan produksi bahan pangan dalam negeri sebelum melakukan impor.
6. Komisi VI DPR RI mendorong Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero) untuk berpartisipasi secara aktif dalam program stimulus pemerintah dan meningkatkan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan usaha, produksi, dan bahan kebutuhan pokok lainnya di tengah kondisi pandemi Covid-19.
7. Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero) untuk melakukan berbagi terobosan dalam mengatur kegiatan operasional ditengah kondisi pandemi Covid 19.
8. Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk segera mengatasi kelangkaan gula dan menjaga stabilitas harga yang disebabkan kesulitan impor *raw material* gula dan faktor permainan distribusi.
9. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero), untuk memastikan distribusi benih berjalan baik ditengah kondisi pandemi Covid 19.

10. Komisi VI DPR RI meminta RNI sebagai koordinator klaster pangan BUMN untuk melakukan pemetaan dan antisipasi kelangkaan pangan, baik dalam hal ketahanan pangan (impor) maupun kedaulatan pangan (penanaman massif dan penyiapan bahan pangan alternatif). Termasuk dalam melakukan inovasi maupun penggalangan pendanaan pemerintah dan sumber keuangan lainnya.
11. Komisi VI DPR RI meminta BUMN pangan untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.58 WIB.

Jakarta, 20 April 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

ARIA BIMA
A-189